



# **BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO**

---

## **PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 60 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, perlu diatur mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Boalemo ini.

#### Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a. 
$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:  
 W = Dana Desa setiap Desa  
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan  
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan  
 Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan  
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di Keluarkan Badan Pusat Statistik Kab. Boalemo.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II.

- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- a. Pembangunan Desa;
  - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang meliputi:
- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
  - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
  - e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- a. Program lainnya sesuai kondisi Desa dan diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.

- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
  - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
  - e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
  - f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
  - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau

- h. Program lainnya sesuai kondisi Desa dan diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.

## BAB V PELAPORAN DAN SANKSI

### Bagian Kesatu

#### Pelaporan

##### Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

##### Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;



b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## Bagian Kedua

### Sanksi

#### Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada Saat Peraturan Bupati Ini Berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 499) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal 22 DESEMBER 2015

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal 22 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



**Ir. SUJARNO ABD. HAMID**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19581226 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR...545

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 60 TAHUN 2015

TANGGAL : 22 DESEMBER 2015

TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)			
1	BONGO NOL	565,640,000	1968	1.38%	0.35%	152	1.28%	0.45%	9.96	0.54%	0.05%	21.79	0.69%	0.21%	1.05%	61,497,345	627,137,000
2	BONGO IV	565,640,000	2236	1.57%	0.39%	144	1.21%	0.42%	6.45	0.35%	0.03%	31.25	0.99%	0.30%	1.15%	67,032,756	632,673,000
3	MOLOMBULAHE	565,640,000	2204	1.55%	0.39%	142	1.19%	0.42%	6.88	0.37%	0.04%	26.17	0.83%	0.25%	1.09%	63,671,927	629,312,000
4	MUTIARA	565,640,000	1543	1.09%	0.27%	85	0.71%	0.25%	3.60	0.19%	0.02%	23.93	0.76%	0.23%	0.77%	44,842,777	610,483,000
5	SARIPI	565,640,000	2311	1.63%	0.41%	228	1.91%	0.67%	22.80	1.23%	0.12%	26.40	0.84%	0.25%	1.45%	84,641,245	650,281,000
6	WONGGAHU	565,640,000	3101	2.18%	0.55%	200	1.68%	0.59%	9.42	0.51%	0.05%	39.39	1.25%	0.38%	1.56%	90,969,105	656,609,000
7	TANGKOBU	565,640,000	1803	1.27%	0.32%	187	1.57%	0.55%	8.27	0.44%	0.04%	26.28	0.84%	0.25%	1.16%	67,771,994	613,412,000
8	BONGO TUA	565,640,000	1516	1.07%	0.27%	104	0.87%	0.31%	15.57	0.84%	0.08%	29.64	0.94%	0.28%	0.94%	54,752,850	620,393,000
9	KUALALUMPUR	565,640,000	1491	1.05%	0.26%	123	1.03%	0.36%	5.43	0.29%	0.03%	33.98	1.08%	0.32%	0.98%	56,987,479	622,627,000
10	MUSTIKA	565,640,000	1035	0.73%	0.18%	54	0.45%	0.16%	1.62	0.09%	0.01%	40.14	1.28%	0.38%	0.73%	42,708,483	608,348,000
11	TENILO	565,640,000	1302	0.92%	0.23%	130	1.09%	0.38%	6.69	0.36%	0.04%	41.62	1.32%	0.40%	1.04%	60,892,622	626,533,000
12	HUWONGO	565,640,000	1431	1.01%	0.25%	108	0.91%	0.32%	5.61	0.30%	0.03%	22.94	0.73%	0.22%	0.82%	47,714,746	613,355,000
13	KARYA MURNI	565,640,000	672	0.47%	0.12%	58	0.49%	0.17%	8.46	0.46%	0.05%	51.21	1.63%	0.49%	0.82%	47,973,856	613,614,000
14	GIRISA	565,640,000	1034	0.73%	0.18%	78	0.66%	0.23%	12.76	0.69%	0.07%	45.54	1.45%	0.43%	0.91%	53,314,229	618,954,000
15	BATU KRAMAT	565,640,000	957	0.67%	0.17%	107	0.90%	0.31%	12.80	0.69%	0.07%	40.84	1.30%	0.39%	0.94%	54,893,542	620,534,000
16	BUALO	565,640,000	1259	0.89%	0.22%	143	1.20%	0.42%	2.56	0.14%	0.01%	54.95	1.75%	0.52%	1.18%	68,801,372	634,441,000
17	SOSIAL	565,640,000	1424	1.00%	0.25%	55	0.46%	0.16%	4.73	0.25%	0.03%	36.53	1.16%	0.35%	0.79%	45,839,590	611,480,000
18	PERMATA	565,640,000	1131	0.80%	0.20%	39	0.33%	0.11%	3.90	0.21%	0.02%	26.71	0.85%	0.25%	0.59%	34,366,379	600,009,000
19	HULAWA	565,640,000	943	0.66%	0.17%	78	0.66%	0.23%	4.08	0.22%	0.02%	47.73	1.52%	0.46%	0.87%	50,876,273	616,516,000
20	BALATE JAYA	565,640,000	931	0.65%	0.16%	117	0.98%	0.34%	4.19	0.23%	0.02%	50.08	1.59%	0.48%	1.01%	58,778,207	624,418,000
21	REJONEGORO	565,640,000	1372	0.96%	0.24%	129	1.08%	0.38%	6.94	0.37%	0.04%	39.95	1.27%	0.38%	1.04%	60,592,780	626,233,000
22	DILOATO	565,640,000	1412	0.99%	0.25%	116	0.97%	0.34%	4.25	0.23%	0.02%	31.75	1.01%	0.30%	0.91%	53,367,234	619,007,000
23	HARAPAN	565,640,000	3366	2.37%	0.59%	120	1.01%	0.35%	10.37	0.56%	0.06%	30.28	0.96%	0.29%	1.29%	75,198,512	640,839,000
24	BONGO DUA	565,640,000	1955	1.37%	0.34%	79	0.66%	0.23%	6.4	0.34%	0.03%	27.39	0.87%	0.26%	0.87%	50,841,413	616,481,000
25	BONGO TIGA	565,640,000	1763	1.24%	0.31%	69	0.58%	0.20%	6.3	0.34%	0.03%	42.13	1.34%	0.40%	0.95%	55,323,709	620,964,000
26	MEKARJAYA	565,640,000	1451	1.02%	0.26%	88	0.74%	0.26%	44.61	2.40%	0.24%	37.72	1.20%	0.36%	1.11%	64,953,315	630,593,000
27	SUKAMAJU	565,640,000	2218	1.56%	0.39%	211	1.77%	0.62%	7.51	0.40%	0.04%	52.70	1.67%	0.50%	1.55%	90,601,675	656,242,000
28	PANGEYA	565,640,000	3796	2.67%	0.67%	251	2.11%	0.74%	34.10	1.83%	0.18%	44.46	1.41%	0.42%	2.01%	117,404,869	683,045,000
29	JATIMULYA	565,640,000	1751	1.23%	0.31%	76	0.64%	0.22%	5.23	0.28%	0.03%	43.96	1.40%	0.42%	0.98%	57,085,288	622,725,000
30	SUKAMULYA	565,640,000	1247	0.88%	0.22%	166	1.39%	0.49%	2.00	0.11%	0.01%	42.90	1.36%	0.41%	1.13%	65,743,918	631,384,000
31	SARI TANI	565,640,000	5242	3.69%	0.92%	474	3.98%	1.39%	47.97	2.58%	0.26%	36.18	1.15%	0.34%	2.92%	170,229,620	735,870,000
32	DIMITO	565,640,000	2254	1.58%	0.40%	240	2.02%	0.71%	42.50	2.29%	0.23%	42.86	1.36%	0.41%	1.74%	101,450,300	667,090,000
33	TANJUNG HARAPAN	565,640,000	872	0.61%	0.15%	98	0.82%	0.29%	6.71	0.36%	0.04%	40.62	1.29%	0.39%	0.86%	50,448,935	616,089,000
34	RAHARJA	565,640,000	765	0.54%	0.13%	64	0.54%	0.19%	4.43	0.24%	0.02%	47.99	1.52%	0.46%	0.80%	46,903,096	612,543,000


No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) - (3) + (17)			
35	TRI RUKUN	565,640,000	1038	0.73%	0.18%	58	0.49%	0.17%	4.20	0.23%	0.02%	42.00	1.33%	0.40%	0.78%	45,271,326	610,911,000
36	DULOHUPA	565,640,000	948	0.67%	0.17%	68	0.57%	0.20%	4.60	0.25%	0.02%	52.03	1.65%	0.50%	0.89%	51,763,654	617,404,000
37	DULUPI	565,640,000	4113	2.89%	0.72%	316	2.65%	0.93%	27.10	1.46%	0.15%	30.07	0.96%	0.29%	2.08%	121,604,385	687,244,000
38	TABONGO	565,640,000	2027	1.43%	0.36%	158	1.33%	0.46%	39.20	2.11%	0.21%	46.71	1.48%	0.45%	1.48%	86,166,820	651,807,000
39	KOTARAJA	565,640,000	2096	1.47%	0.37%	253	2.12%	0.74%	16.10	0.87%	0.09%	33.12	1.05%	0.32%	1.51%	88,357,317	653,997,000
40	POLOHUNGO	565,640,000	2197	1.54%	0.39%	236	1.98%	0.69%	16.73	0.90%	0.09%	39.16	1.24%	0.37%	1.54%	90,036,491	655,676,000
41	PANGI	565,640,000	1383	0.97%	0.24%	169	1.42%	0.50%	12.40	0.67%	0.07%	46.37	1.47%	0.44%	1.25%	72,844,609	638,485,000
42	TANGGA JAYA	565,640,000	1367	0.96%	0.24%	176	1.48%	0.52%	38.80	2.09%	0.21%	48.12	1.53%	0.46%	1.42%	83,139,945	648,780,000
43	TANAH PUTIH	565,640,000	1276	0.90%	0.22%	149	1.25%	0.44%	12.50	0.67%	0.07%	30.41	0.97%	0.29%	1.02%	59,477,805	625,118,000
44	TANGGA BARITO	565,640,000	2341	1.65%	0.41%	310	2.60%	0.91%	169.70	9.13%	0.91%	48.19	1.53%	0.46%	2.69%	157,227,958	722,868,000
45	LIMBATO	565,640,000	1862	1.31%	0.33%	33	0.28%	0.10%	0.61	0.03%	0.00%	25.53	0.81%	0.24%	0.67%	39,145,843	604,786,000
46	PILOLIYANGA	565,640,000	3639	2.56%	0.64%	230	1.93%	0.68%	45.60	2.45%	0.25%	45.73	1.45%	0.44%	2.00%	116,510,965	682,151,000
47	AYUHULALO	565,640,000	2219	1.56%	0.39%	153	1.28%	0.45%	61.00	3.28%	0.33%	33.14	1.05%	0.32%	1.48%	86,572,458	652,212,000
48	HUNGAYONAA	565,640,000	4602	3.24%	0.81%	182	1.53%	0.53%	2.20	0.12%	0.01%	12.57	0.40%	0.12%	1.48%	86,095,413	651,735,000
49	MODELOMO	565,640,000	2828	1.99%	0.50%	121	1.02%	0.36%	3.30	0.18%	0.02%	30.76	0.98%	0.29%	1.16%	67,898,545	633,539,000
50	PENTADU BARAT	565,640,000	2831	1.99%	0.50%	150	1.26%	0.44%	3.32	0.18%	0.02%	41.47	1.32%	0.40%	1.35%	78,868,342	644,508,000
51	PENTADU TIMUR	565,640,000	2166	1.52%	0.38%	228	1.91%	0.67%	4.30	0.23%	0.02%	34.21	1.09%	0.33%	1.40%	81,689,048	647,329,000
52	BAJO	565,640,000	1530	1.08%	0.27%	141	1.18%	0.41%	0.40	0.02%	0.00%	36.30	1.15%	0.35%	1.03%	60,185,943	625,826,000
53	MOHUNGO	565,640,000	2653	1.87%	0.47%	169	1.42%	0.50%	4.00	0.22%	0.02%	42.27	1.34%	0.40%	1.39%	80,958,700	646,599,000
54	LAHUMBO	565,640,000	2307	1.62%	0.41%	229	1.92%	0.67%	46.70	2.51%	0.25%	38.55	1.23%	0.37%	1.70%	99,030,569	664,671,000
55	LAMU	565,640,000	1638	1.15%	0.29%	133	1.12%	0.39%	9.00	0.48%	0.05%	33.73	1.07%	0.32%	1.05%	61,189,595	626,830,000
56	TENILO	565,640,000	666	0.47%	0.12%	86	0.72%	0.25%	7.00	0.38%	0.04%	40.26	1.28%	0.38%	0.79%	46,168,221	611,808,000
57	TABULO	565,640,000	1498	1.05%	0.26%	91	0.76%	0.27%	0.78	0.04%	0.00%	24.51	0.78%	0.23%	0.77%	44,843,944	610,484,000
58	KAARUYAN	565,640,000	650	0.46%	0.11%	29	0.24%	0.09%	77.24	4.15%	0.42%	38.13	1.21%	0.36%	0.98%	57,088,143	622,728,000
59	SALILAMA	565,640,000	1177	0.83%	0.21%	113	0.95%	0.33%	1.79	0.10%	0.01%	47.18	1.50%	0.45%	1.00%	58,249,256	623,889,000
60	BENDUNGAN	565,640,000	1977	1.39%	0.35%	165	1.39%	0.48%	106.92	5.75%	0.58%	41.95	1.33%	0.40%	1.81%	105,458,167	671,098,000
61	MANANGGU	565,640,000	1721	1.21%	0.30%	124	1.04%	0.36%	13.32	0.72%	0.07%	33.43	1.06%	0.32%	1.06%	61,687,345	627,327,000
62	BUTI	565,640,000	1867	1.31%	0.33%	173	1.45%	0.51%	62.76	3.38%	0.34%	47.06	1.50%	0.45%	1.62%	94,685,946	660,326,000
63	PONTOLO	565,640,000	940	0.66%	0.17%	132	1.11%	0.39%	36.31	1.95%	0.20%	45.60	1.45%	0.43%	1.18%	69,034,807	634,675,000
64	KRAMAT	565,640,000	1233	0.88%	0.22%	147	1.23%	0.43%	5.10	0.27%	0.03%	31.79	1.01%	0.30%	0.98%	57,344,140	622,984,000
65	TABULO SELATAN	565,640,000	1021	0.72%	0.18%	99	0.83%	0.29%	2.57	0.14%	0.01%	40.46	1.29%	0.39%	0.87%	50,756,257	616,396,000
66	TUTULO	565,640,000	1581	1.11%	0.28%	87	0.73%	0.26%	1.20	0.06%	0.01%	25.72	0.82%	0.25%	0.79%	45,816,499	611,456,000
67	HUTAMONU	565,640,000	1382	0.97%	0.24%	177	1.49%	0.52%	94.00	5.06%	0.51%	31.31	0.99%	0.30%	1.57%	91,442,496	657,082,000
68	PATOAMEME	565,640,000	2396	1.68%	0.42%	182	1.53%	0.53%	2.00	0.11%	0.01%	39.95	1.27%	0.38%	1.35%	78,629,792	644,270,000
69	TAPADAA	565,640,000	1469	1.03%	0.26%	165	1.39%	0.48%	3.03	0.16%	0.02%	27.24	0.87%	0.26%	1.02%	59,466,276	625,106,000
70	POTANGA	565,640,000	1668	1.17%	0.29%	130	1.09%	0.38%	14.00	0.75%	0.08%	37.91	1.20%	0.36%	1.11%	64,878,411	630,518,000
71	BOTUMOTO	565,640,000	2607	1.83%	0.46%	300	2.52%	0.88%	129.00	6.94%	0.69%	25.98	0.83%	0.25%	2.28%	133,117,217	698,757,000
72	BOLIHUTUO	565,640,000	1433	1.01%	0.25%	154	1.29%	0.45%	10.00	0.54%	0.05%	30.88	0.98%	0.29%	1.05%	61,417,599	627,058,000
73	RUMBIA	565,640,000	1799	1.27%	0.32%	164	1.38%	0.48%	76.00	4.09%	0.41%	54.94	1.75%	0.52%	1.73%	100,983,580	666,624,000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) - (3) + (17)
74	DULANGEYA	565,640,000	666	0.47%	0.12%	84	0.71%	0.25%	157.00	8.44%	0.84%	43.58	1.38%	0.42%	1.62%	94,742,608	660,383,000
75	BUBAA	565,640,000	1464	1.03%	0.26%	170	1.43%	0.50%	48.61	2.61%	0.26%	29.03	0.92%	0.28%	1.30%	75,568,259	641,208,000
76	LITO	565,640,000	1327	0.93%	0.23%	228	1.91%	0.67%	32.61	1.75%	0.18%	31.95	1.02%	0.30%	1.38%	80,712,325	646,352,000
77	LIMBATIHU	565,640,000	1867	1.31%	0.33%	264	2.22%	0.78%	25.26	1.36%	0.14%	34.40	1.09%	0.33%	1.57%	91,481,484	657,121,000
78	BUKIT KARYA	565,640,000	721	0.51%	0.13%	126	1.06%	0.37%	6.38	0.34%	0.03%	45.05	1.43%	0.43%	0.96%	56,059,853	621,700,000
79	APTALAWO	565,640,000	787	0.55%	0.14%	143	1.20%	0.42%	18.38	0.99%	0.10%	43.27	1.37%	0.41%	1.07%	62,429,724	628,070,000
80	BANGGA	565,640,000	390	0.27%	0.07%	43	0.36%	0.13%	2.83	0.15%	0.02%	64.37	2.05%	0.61%	0.82%	48,060,394	613,700,000
81	TOWAYU	565,640,000	441	0.31%	0.08%	71	0.60%	0.21%	7.60	0.41%	0.04%	65.28	2.07%	0.62%	0.95%	55,390,934	621,031,000
82	OLIBU	565,640,000	625	0.44%	0.11%	86	0.72%	0.25%	10.63	0.57%	0.06%	57.50	1.83%	0.55%	0.97%	56,474,153	622,114,000
<b>Total</b>		<b>46,382,480,000</b>	<b>142,210</b>	<b>100.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>11,908</b>	<b>100.00%</b>	<b>35.00%</b>	<b>1,859</b>	<b>100.00%</b>	<b>10.00%</b>	<b>3,147</b>	<b>100.00%</b>	<b>30.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,834,495,000</b>	<b>52,216,975,000</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	52,216,975,000
Pagu Alokasi Dasar	565,640,000
Pagu Bagian Formula	5,834,495,000
Jumlah Desa	82

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	52,216,975,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten X	-
Pagu Alokasi Dasar	565,640,000
Total Pagu Alokasi Dasar	46,382,480,000
Total Pagu Alokasi Formula	5,834,495,000
Jumlah Desa	82

BUPATI BOALEMO,  
  
 RUM PAGAU